

Sinergi Model Sewa Guna Usaha dengan Model Pembiayaan (*Financing*) pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Utara)

Hery Susanto¹, I Nyoman Nugraha Ardana Putra²; Endar Pituringsih^{3*}

¹Universitas Terbuka, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

^{2,3}Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Abstract

North Lombok District (KLU) has great potential in the tourism sector, but faces economic challenges, including the tendency of communities to sell land to meet short-term needs. This study aims to develop a leasing-based financing model to support the sustainability of the tourism sector in KLU. This model integrates the Community-Based Tourism (CBT) approach, which involves local communities in management and decision-making. Research data were obtained through in-depth interviews with landowners and other stakeholders, using thematic analysis methods. The results show that leasing can be an alternative financing solution, enabling productive land use without loss of ownership. Synergy between the community, government and private sector was found to be key to the success of this model. This research contributes to the literature by offering an innovative approach that supports economic and social sustainability in rural tourism areas.

Keywords: *leasing model; financing; and tourism sector*

Abstrak

Kabupaten Lombok Utara (KLU) memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, namun menghadapi tantangan ekonomi, termasuk kecenderungan masyarakat untuk menjual lahan guna memenuhi kebutuhan jangka pendek. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembiayaan berbasis sewa guna usaha (*leasing*) dalam mendukung keberlanjutan sektor pariwisata di KLU. Model ini mengintegrasikan pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT), yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik tanah dan pemangku kepentingan lainnya, menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leasing* dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan, memungkinkan pemanfaatan lahan secara produktif tanpa kehilangan kepemilikan. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta ditemukan menjadi kunci keberhasilan model ini. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur dengan menawarkan pendekatan inovatif yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial di kawasan pariwisata pedesaan.

Kata Kunci: model leasing; pembiayaan; dan sektor pariwisata

PENDAHULUAN

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi yang memiliki berbagai potensi yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Salah satunya Nusa Tenggara Barat berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui destinasi pariwisata. Keindahan alam yang

*Penulis korespondensi. endar07ringsih@unram.ac.id

dimiliki oleh Provinsi NTB sukses menakjubkan dunia untuk dapat berkunjung menikmati pemandangannya. Berikut data kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat.

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke NTB

No.	Bulan	2018		2019		2020	
		DN	LN	DN	LN	DN	LN
1	Januari	104.873	89.234	76.392	50.877	52.744	15.120
2	Pebruari	112.429	101.756	78.225	56.451	48.381	12.294
3	Maret	111.254	97.902	79.113	62.446	32.553	9.413
4	April	275.443	181.329	152.698	103.557	2.720	70
5	Mei	227.311	192.006	172.445	124.903	2.465	145
6	Juni	239.522	199.177	258.336	155.387	8.947	138
7	Juli	310.219	206.813	277.908	181.002	18.379	302
8	Agustus	18.346	1.412	284.651	196.508	29.473	459
9	September	50.165	33.443	167.004	122.668	27.669	244
10	Oktober	33.275	25.120	188.326	132.891	39.880	610
11	November	33.702	25.110	194.009	153.663	44.602	448
12	Desember	91.284	51.254	226.454	210.438	52.800	739
Total		1.607.823	1.204.556	2.155.561	1.550.791	360.613	39.982

Sumber: DKAN Diskominfo NTB (2023)

Data tabel 1 menunjukkan dampak drastis COVID-19 terhadap sektor pariwisata, dengan penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan, khususnya di tahun 2020. Sementara tahun 2019 adalah puncak performa, pandemi mengubah tren secara signifikan. Dampak ini juga dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata. Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pariwisata digambarkan dengan penyebaran wisatawan Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) yang terkonsentrasi pada dua kecamatan berdasarkan tingkat hunian yang terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Wisatawan KLU Berdasarkan Tingkat Hunian

Kecamatan	2018		2019		2020	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN
Pemenang	997	5.585	531	6.376	1.860	4.065
Tanjung	608	3.762	309	3.044	526	1.148
Gangga	0	0	0	0	0	0
Kayangan	0	0	0	0	0	0
Bayan	0	0	0	0	0	0
Lombok Utara	1.605	9.347	840	9.420	2.386	5.213

Sumber: DKAN Diskominfo NTB (2023)

Berdasarkan tabel 2, dapat dijelaskan adanya fluktuasi pada kunjungan wisatawan KLU khususnya pada Kecamatan Pemenang dan Tanjung, dengan melihat adanya daya tarik wisata yang ditawarkan sebagaimana yang ada di Pelabuhan Bangsal pada Kecamatan Pemenang yang berdekatan dengan Kecamatan Tanjung menuju Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno. Data yang diperoleh tertinggi pada tahun 2018 terkait kunjungan wisatawan secara keseluruhan 10.952 orang. Pada tahun 2020 mengalami fluktuasi yang diakibatkan oleh kejadian pandemi COVID-19 (Aini et al., 2021). Sektor pariwisata di KLU mengalami tantangan berat akibat bencana gempa bumi pada 2018 yang menekan aktivitas ekonomi. Meski sempat bangkit pada 2019, sektor ini

kembali terpuruk pada Maret 2020 akibat pandemi COVID-19, yang sangat memengaruhi perekonomian daerah termasuk pada pendapatan masyarakat. Pada tahun 2020, tercatat jumlah pengangguran di KLU mencapai 3,01 persen dari 1,99 persen pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021). Data ini didukung dengan data rata-rata upah pekerja informal di KLU tahun 2020 yang menurun hingga 34 persen pada sektor industri, 24 persen pada sektor jasa, dan 9% pada sektor pertanian (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020). Dalam menghadapi kondisi ekonomi yang semakin menurun, salah satu fenomena yang diamati adalah kecenderungan masyarakat untuk menjual tanah mereka guna mengatasi kesulitan ekonomi. Namun, keputusan ini sering kali mengabaikan potensi pendapatan jangka panjang dari pemanfaatan lahan melalui alternatif lain.

Kabupaten Lombok Utara (KLU) memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, didukung oleh keberadaan hotel berbintang, villa, dan berbagai rumah makan. Selain itu, pembangunan sarana pariwisata terus dilakukan. Namun, terdapat fenomena yang memprihatinkan di mana ribuan hektar tanah di NTB dikuasai oleh pihak asing (Maulana, 2015). Penjualan tanah, jika hasilnya tidak digunakan untuk kegiatan produktif atau investasi, dapat merugikan masyarakat. Tanah pedesaan yang dijual cenderung tidak memberikan manfaat signifikan ketika hasil penjualannya digunakan secara konsumtif (Carter & Mesbah, 1993). Bahkan, Platteau (1996) menyatakan bahwa pasar tanah di pedesaan sering kali gagal, khususnya di negara-negara berkembang. Untuk itu, diperlukan alternatif pembiayaan seperti *leasing*, yang dapat membantu masyarakat mempertahankan kepemilikan aset mereka sekaligus memanfaatkan lahan secara produktif.

Leasing, yang sering dianggap sebagai solusi pembiayaan khusus Brigham & Houston (2001) memberikan kesempatan bagi lessee untuk memanfaatkan aset tanpa harus memilikinya. Dalam konteks penelitian ini, *leasing* lebih difokuskan pada penyewaan lahan untuk sektor pariwisata. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat memanfaatkan lahan mereka secara produktif tanpa kehilangan kepemilikan. *Leasing* juga menawarkan solusi untuk masalah permodalan yang sering dihadapi oleh masyarakat dan UMKM dalam mengembangkan usaha mereka (Putra, 2015). Dengan pembiayaan *leasing*, dana dapat dialokasikan secara efektif baik dari dalam maupun luar perusahaan, mendukung keberlanjutan ekonomi lokal.

Penelitian ini merujuk pada studi Yao (2000) tentang model *leasing* lahan di pedesaan China yang memberikan manfaat bagi petani tanpa lahan. Laia (2023) mengemukakan bahwa penerapan *leasing* lahan memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan petani di desa Nanowa. Sementara Raji & Kamarudin (2015) mencatat keberhasilan privatisasi properti di Malaysia sejak 1980-an. Promsopha (2015) merekomendasikan model yang memberikan rasa aman bagi rumah tangga untuk tidak menjual tanah, mengusulkan *leasing* sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan. Namun, penerapan model *leasing* lahan ini tidak selamanya membawa dampak positif bagi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani & Rahman (2024) menunjukkan hasil yang sebaliknya, dimana penerapan sewa guna lahan di wilayah pesisir pantai Maluk justru mematikan perekonomian masyarakat sekitar karena pengelolaan lahan hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Beragam hasil dari studi literatur yang muncul dapat dijadikan sebagai research gap dalam penelitian ini.

Penelitian ini menawarkan keterbaruan dengan mengadopsi konsep *Community-Based Tourism* (CBT) untuk pengembangan model *leasing* di wilayah pesisir KLU. CBT melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan terkait pariwisata, sehingga memberikan dampak langsung berupa peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, serta pelestarian lingkungan dan budaya lokal (Setyaningsih, 2010). Melalui konsep ini, masyarakat setempat diharapkan dapat menjaga jati diri mereka sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Tujuan utama penelitian ini adalah membangun model pembiayaan berbasis *leasing* untuk sektor pariwisata di KLU. Model ini bertujuan mensinergikan pembiayaan *leasing* dengan potensi pariwisata lokal, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi pemilik lahan dan mendukung keberlanjutan ekonomi daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan solusi pembiayaan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir di KLU.

METODE PENELITIAN

Paradigma penelitian yang digunakan adalah konstruktivis kualitatif, yang berfokus untuk memahami pengalaman dan perspektif subjek membangun model atau konsep (Waruwu, 2023). Penelitian dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap penyusunan model *leasing*, konstruksi model pembiayaan dan pensinergian model *leasing* dengan model pembiayaan. Pendekatan penyusunan model adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian studi kasus tunggal (*single case multi sites*) adalah model penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman mendalam dari individu (Fadli, 2021).

Lokasi penelitian ini ditentukan secara purposif dengan menargetkan wilayah yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Lombok Utara (KLU), provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Populasi penelitian ini adalah pemilik tanah yang bertindak sebagai pelaku usaha baik individu atau kelompok di wilayah KLU yang bertindak sebagai penyewa lahan dan yang menyewa lahan. Narasumber penelitian ini ditentukan dengan kriteria: pertama, individu atau kelompok yang sedang atau memiliki pengalaman dalam menyewakan lahan di KLU minimal satu tahun. Kedua, individu atau kelompok yang sedang atau memiliki pengalaman dalam menyewakan lahan di KLU yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini dengan memberikan wawancara dan data yang diperlukan untuk penelitian.

Berdasarkan kriteria narasumber diatas, wawancara dilakukan pada pemilik tanah sebanyak 6 orang yang bertindak sebagai penyewa lahan dan sebagai bentuk triangulasi dalam rangka validitas data dipergunakan wawancara dengan *stakeholder* serta hasil wawancara dengan pihak yang menyewa (*lessor*) sebagai informan kunci. Pengujian kevaliditasan atau triangulasi data dilakukan melalui penggunaan data sekunder dan wawancara dari informan lain, untuk memastikan konsistensi informasi sehingga dapat diketahui data yang diambil dapat dipercaya keabsahannya. Data penelitian diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*indepth interview*) untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan narasumber mengenai proses *leasing* dan manfaat yang diperoleh. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara dengan menggunakan *guiding question* yang berperan sebagai protokol dalam penelitian studi kasus (terlampir).

Analisis data pada penelitian ini adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Miles et al. (2014), yakni menggunakan teknik analisis secara sistematis. Adapun analisis datanya melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan melalui media telekomunikasi. Selanjutnya tahap reduksi data dengan memilih data yang relevan, dan mengelompokkan data sehingga lebih ringkas sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara dilakukan dengan enam pemilik tanah yang bertindak sebagai penyewa lahan. Sebagai langkah untuk meningkatkan validitas data, triangulasi dilakukan dengan melibatkan wawancara dari berbagai sumber, termasuk pemangku kepentingan dan pihak penyewa (*lessor*) sebagai informan kunci. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendukung pengembangan model pembiayaan di sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Utara. Dari proses wawancara tersebut,

diperoleh lima tema utama yang menjadi fokus penelitian. Proses identifikasi tema ini dilakukan melalui analisis mendalam terhadap data yang diperoleh dari masing-masing informan, yakni Informan 1, Informan 2, Informan 3, Informan 4, Informan 5, dan Informan 6. Tema-tema tersebut kemudian divalidasi dengan mencocokkan hasil wawancara dari berbagai sumber informasi, sehingga memungkinkan pengujian tingkat konsistensi dan relevansi antar informan. Melalui langkah triangulasi ini, tema besar yang awalnya diidentifikasi secara luas, akhirnya mengerucut menjadi lima tema utama. Kelima tema ini menjadi dasar utama dalam membangun model pembiayaan sektor pariwisata yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan di wilayah penelitian. Proses identifikasi tema ini menggambarkan hubungan erat antara metode penelitian dan pembahasan hasil, serta menunjukkan bagaimana data yang dikumpulkan menjadi landasan kuat bagi model yang dikembangkan.

Tema pertama adalah pengembangan sektor pariwisata yang menjanjikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para informan, baik pemilik tanah maupun penyewa, sepakat bahwa pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Utara sangat menjanjikan. Informan 1 menyatakan, *"Animo wisatawan sangat tinggi, terutama sejak kawasan tiga Gili mulai dikenal luas. Banyak pengunjung dari Bali yang memperluas kunjungan mereka ke Lombok karena lokasi yang berdekatan."* Informan 2 menambahkan bahwa sejak 1980-an, pariwisata di wilayah ini berkembang pesat, dimulai dengan destinasi Senggigi di Lombok Barat yang kini meluas hingga Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Informan 3 juga mencatat fenomena meningkatnya investasi dari luar daerah, baik dari investor lokal di Bali maupun internasional. Menurutnya, *"Investasi penginapan dan restoran berkembang pesat di tiga Gili, dan ini menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi lokal."* Berdasarkan tanggapan ini, tema pertama menggarisbawahi daya tarik wilayah Lombok Utara sebagai destinasi wisata unggulan yang mendorong minat investasi.

Tema kedua adalah kebutuhan pembiayaan untuk persaingan bisnis pariwisata. Sebagian besar informan menggarisbawahi pentingnya akses ke pembiayaan untuk mendukung pengembangan usaha mereka. Informan 4 menjelaskan, *"Kami membutuhkan modal untuk membangun fasilitas seperti vila dan restoran, karena persaingan semakin ketat."* Hal ini didukung oleh Informan 5 yang menyebutkan bahwa banyak pengusaha lokal merasa kesulitan bersaing dengan investor luar karena keterbatasan modal. Namun, informan juga menekankan bahwa pinjaman ini seringkali menghadapi kendala, terutama dalam hal agunan. *"Banyak pengusaha lokal yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki dokumen lengkap untuk dijadikan jaminan,"* ujar Informan 6. Oleh karena itu, kebutuhan akan pinjaman yang lebih fleksibel dan terjangkau menjadi salah satu fokus pembahasan dalam mengembangkan model pembiayaan pariwisata.

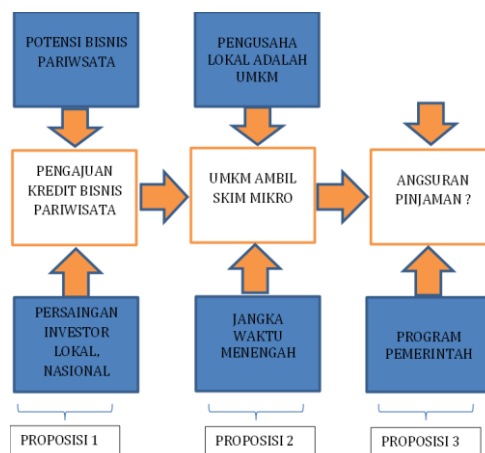
Tema ketiga adalah dominasi skim kredit jangka menengah. Wawancara menunjukkan bahwa pinjaman untuk pengembangan usaha pariwisata didominasi oleh skim kredit jangka menengah. Informan 1 menyebutkan, *"Jangka waktu pinjaman yang ideal bagi kami adalah antara 2 hingga 5 tahun, cukup untuk membangun dan mulai mengoperasikan usaha."* Sementara itu, Informan 2 menyoroti pentingnya agunan untuk mendapatkan pinjaman ini. *"Kami biasanya menggunakan tanah atau bangunan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank lokal,"* ujarnya. Namun, beberapa informan mengeluhkan tingginya suku bunga untuk kredit jangka menengah. Informan 4 menyatakan, *"Suku bunga menjadi kendala utama bagi kami, terutama di masa pandemi saat pengunjung berkurang drastis."* Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan kredit yang lebih mendukung, terutama untuk UMKM di sektor pariwisata.

Tema keempat adalah pentingnya penggunaan kredit yang sesuai. Para informan sepakat bahwa penggunaan kredit yang sesuai dengan tujuan pinjaman adalah kunci keberhasilan usaha. Informan 3 menegaskan, *"Jika dana kredit digunakan untuk hal-hal yang tidak relevan, seperti membeli barang pribadi, maka usaha akan kesulitan membayar angsuran."* Informan 5 menambahkan, *"Kami harus memastikan dana kredit digunakan untuk meningkatkan kapasitas*

usaha, seperti membeli peralatan atau memperluas fasilitas." Namun, ada beberapa kasus di mana kredit tidak digunakan sesuai rencana, yang mengakibatkan kesulitan keuangan. Informan 6 menyebutkan, "Beberapa rekan saya menggunakan dana kredit untuk kebutuhan pribadi, dan akhirnya mereka kesulitan membayar angsuran." Tema ini menekankan perlunya edukasi dan monitoring dari lembaga keuangan untuk memastikan dana kredit digunakan dengan tepat.

Tema kelima adalah lancarnya angsuran kredit dan peran program pemerintah. Sebagian besar informan mengakui bahwa angsuran kredit berjalan lancar jika penggunaan dana sesuai rencana. Informan 1 menyatakan, "Kami selalu membayar angsuran tepat waktu karena dana digunakan sesuai tujuan usaha." Namun, pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi sebagian pengusaha. Informan 4 mengungkapkan, "Pandemi membuat usaha kami sangat sepi, tetapi program restrukturisasi dari pemerintah sangat membantu kami dalam membayar angsuran." Program seperti rescheduling (penjadwalan ulang) dan restructuring (restrukturisasi) menjadi solusi yang membantu banyak pengusaha pariwisata tetap bertahan. Informan 6 menambahkan, "Perpanjangan waktu jatuh tempo sangat membantu kami, terutama selama masa pandemi."

Berikut ini gambaran model pembiayaan disektor pariwisata dari penjelasan tiga proposisi yang terbentuk dari lima tema besar yang ada.



Gambar 1. Pembiayaan Bisnis Pariwisata

Berdasarkan Gambar 1 tersebut nampak bahwa pembiayaan pada sektor pariwisata di Lombok Utara sangat erat kaitannya dengan potensi alam berupa keindahan gunung, pantai, serta budaya lokal yang kaya. Potensi ini telah menarik banyak investor untuk memulai dan mengembangkan usaha di sektor pariwisata. Berdasarkan wawancara, pengembangan destinasi wisata seperti kawasan tiga Gili menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, meningkatnya jumlah wisatawan juga memicu persaingan, baik dari pengusaha lokal maupun investor luar daerah dan internasional, yang sebagian besar menggunakan pinjaman sebagai strategi ekspansi bisnis mereka.

Sebagian besar pinjaman di sektor pariwisata menggunakan skim kredit jangka menengah dengan jangka waktu pelunasan yang disesuaikan dengan jumlah pinjaman yang diajukan. Bagi UMKM lokal, kredit mikro sering menjadi pilihan utama karena keterbatasan modal awal dan kemampuan agunan. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi pengusaha adalah risiko pelunasan angsuran, terutama selama pandemi COVID-19, ketika jumlah wisatawan menurun drastis. Meski demikian, beberapa pengusaha tetap mampu membayar angsuran tepat waktu berkat program pemerintah, seperti rescheduling dan restructuring pinjaman, yang memberikan keringanan bagi debitur terdampak.

Kondisi ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang sebelum mengajukan kredit. Pengusaha pariwisata harus mempertimbangkan dengan cermat kebutuhan dan penggunaan dana pinjaman agar tidak menimbulkan risiko gagal bayar. Pemanfaatan kredit yang tepat, seperti untuk pengembangan usaha dan peningkatan fasilitas, menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan ketat dan tantangan ekonomi di masa pandemi.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa model sewa guna usaha (*leasing*) melalui pembiayaan (*financing*) berhasil dikembangkan sebagai solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Model ini bertujuan untuk memungkinkan pemanfaatan lahan secara produktif tanpa harus kehilangan kepemilikan aset, sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini menemukan bahwa sektor pariwisata di Lombok Utara memiliki potensi besar berkat daya tarik alam dan budaya yang memikat wisatawan domestik maupun internasional. Hal ini menarik minat investor lokal, nasional, dan asing untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor tersebut.

Namun, pelaku usaha, terutama UMKM, menghadapi tantangan modal sehingga memanfaatkan kredit mikro dengan skema jangka menengah (2–10 tahun) untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka. Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, pemerintah berperan penting melalui program restrukturisasi dan penjadwalan ulang kredit, yang membantu pengusaha tetap melanjutkan pembayaran angsuran meskipun terjadi penurunan jumlah pengunjung. Dengan pendekatan ini, model *leasing* berbasis pembiayaan tidak hanya mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat, tetapi juga mengurangi risiko kehilangan aset dan meningkatkan daya saing pelaku usaha pariwisata lokal. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta menjadi faktor utama dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan di Lombok Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, U., Idrus, S., & Jumail, M. (2021). Potensi Pengembangan Destinasi Pantai Impos di Kabupaten Lombok Utara. *Journal Of Responsible Tourism*, 1(2), 103–118. <https://doi.org/10.47492/jrt.v1i1.998>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2020, February 21). *Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. <https://Ntb.Bps.Go.Id/>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2021, February 23). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. <https://Ntb.Bps.Go.Id/>.
- Brigham, F., & Houston, J. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Edisi 8). Salemba Empat.
- Carter, M. R., & Mesbah, D. (1993). Can Land Market Reform Mitigate the Exclusionary Aspects of Rapid Agro-Export Growth? *World Development*, 21(7), 1085–1100. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(93\)90001-P](https://doi.org/10.1016/0305-750X(93)90001-P)
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Laia, F. (2023). Pengaruh Kegiatan Ekonomi Melalui Sewa Lahan terhadap Pendapatan Petani Padi di Desa Nanowa. *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan*, 2(1).
- Maulana, R. (2015, December 3). *Pemerintah Buka Pemilikan Properti Warga Asing Non Residen*. Bisnis.Com.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebookk* (3rd Edition). Sage Publications.

- Platteau, J. (1996). The Evolutionary Theory of Land Rights as Applied to Sub-Saharan Africa: A Critical Assessment. *Development and Change*, 27(1), 29–86. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1996.tb00578.x>
- Promsopha, G. (2015). Land Ownership as Insurance and the Market for Land: A Study in Rural Vietnam. *Land Economics*, 91(3), 460–478. <https://doi.org/10.3368/le.91.3.460>
- Putra, I. N. N. A. (2015). Riba dan Pembiayaan dalam Konsep Hindu. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 19(3), 488–496.
- Rahmadani, A. D., & Rahman, A. (2024). Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Lahan di Area Sekitar Pantai. *Jurnal Private Law*, 4(3).
- Raji, F., & Kamarudin, N. (2015). The Valuation Approach in Relation to the Model of Privatisation for Land Development Adopted. *Jurnal Teknologi*, 75(10). <https://doi.org/10.11113/jt.v75.5287>
- Setyaningsih, W. (2010). *Community Based Tourism*. Unspress.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Yao, Y. (2000). The Development of the Land Lease Market in Rural China. *Land Economics*, 76(2), 252. <https://doi.org/10.2307/3147227>